

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang dimiliki oleh Badan Publik.

**S**ABTU, 29 Juli 2006 dini hari. Warga desa kami, Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, sudah terlelap tidur, mengistirahatkan diri dari aktivitas padat seharian. Tiba-tiba terdengar ledakan menggelegar; membangunkan ribuan warga dan membuat kepanikan massal. Orang-orang menghambur ke luar rumah dan berkerumun di jalanan lalu bergegas mengambil kendaraan. Sebagian lagi berlari menuju alun-alun.

Ledakan itu terdengar sangat dahsyat seperti suara dentuman pesawat yang jatuh menghantam bumi. Sesaat kemudian terlihat api menyala dari sumur migas kawasan Sukowati 05 yang berada di wilayah desa kami dan dikelola oleh perusahaan Petrochina. Seingat saya, saat itu



guncangan dan ledakan terasa hingga radius 3 kilometer. Kaca-kaca rumah bergetar. Lalu, hawa memanas dan tercium bau menyengat.

Akibat kejadian ini sedikitnya 148 orang terpaksa dirawat di RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, Bojonegoro, sedangkan korban-korban lain yang menderita luka ringan lebih dari 5.000 orang yang terdiri dari warga Desa Campurejo, Desa Sambiroto, dan Desa Ngampel. Desa-desa ini memang paling dekat dengan lokasi ledakan. Meskipun semburan gas dan ledakan di sumur Sukowati bisa diatasi dengan cepat, penanganan korban akibat peristiwa itu tidak tuntas. Bahkan, salah satu warga Dusun Plosolanang, Desa Campurejo, yang merupakan dusun di ring I dari lokasi sumur Sukowati, meninggal dunia. Diduga kuat, korban tewas akibat mengisap gas hidrogen sulfida (H<sub>2</sub>S) yang meruap saat terjadi ledakan.

Sejak 2005, warga memang sudah melakukan protes terhadap aktivitas pengeboran yang tidak mengindahkan hak-hak warga. Pada 22 September 2007, sekitar 25 warga desa kami yang merupakan keluarga korban kebocoran gas beracun Petrochina berunjuk rasa bersama warga Sambiroto dan Campurejo—termasuk saya sendiri.

Kami menduduki Lapangan Sukowati yang dikelola oleh Joint Operating Body (JOB) Pertamina Petrochina East Java.

Kami menuntut pengelolaan Amdal di kawasan Sukowati lebih diperhatikan. Sebab, setelah peristiwa 2006, setahun kemudian masih juga terjadi kebocoran gas. Ada 10 warga dirawat di rumah sakit. Kebetulan saat itu saya yang menjadi koordinator aksi. Pada intinya warga tidak puas dengan sikap Petrochina yang kurang kooperatif dengan warga. Sebenarnya, perusahaan migas itu telah mengantongi UU Amdal dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tetapi kenyataannya, perusahaan itu tidak pernah melibatkan masyarakat dalam Penanganan Kondisi Darurat dan Berbahaya (PKDB) yang dibentuk pada 2006.

Tiga hari sebelum ledakan, warga yang mengkhawatirkan dampak pengeboran sebenarnya sudah melakukan unjuk rasa di sekitar lokasi pengeboran. Dan benar saja, akibat ledakan dan kebocoran gas beracun itu sekarang sawah kami sudah tidak lagi produktif. Bahkan jalanan juga tetap dibiarkan rusak.

Dalam aksi unjuk rasa itu, kami menggunakan media spanduk untuk menyuarakan berbagai tuntutan, misalnya "Sawah Kami Gagal Panen Gara-gara Petrochina"; "Jalanan Rusak Berat gara-gara Kebijakan BP Migas dan Petrochina Merugikan Warga. Daerah Kaya Minyak tapi Sia-sia!". Terdorong oleh rasa tanggung jawab, saya memelopori warga untuk terus



melakukan aksi protes.

Saya dilahirkan di Campurejo pada 11 Desember 1961 dan hingga kini pun menetap di desa kelahiran saya. Sehari-hari saya berprofesi sebagai guru sekolah dasar. Namun, gara-gara saya amat kritis dalam menyikapi ulah Petrochina, saya dimutasi ke Kecamatan Margomulyo yang sangat jauh dari tempat tinggal saya—kurang lebih berjarak 50 kilo meter.

Walupun demikian, saya tidak patah semangat dalam mengawasi kebijakan migas. Melalui berbagai media massa, saya terus melakukan aksi protes. Memang saya sempat agak *down* karena usaha bertahun-tahun belum ada hasil maksimal. Tapi, rasa kecewa itu hanya berlangsung singkat.

Berkat kegigihan dan konsistensi saya dalam memperjuangkan kepentingan warga, kini saya didapuk menjadi anggota Tim Transparansi yang menghimpun perwakilan perusahaan, pemerintah, dan warga. Tiap-tiap anggota Tim Transparansi memiliki satu fokus kerja, yakni bekerja sama mendorong terwujudnya transparansi kebijakan